

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Gunawan Setiardja. 1993. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta; Kanisius.
- Affan Gaffar. 2005. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta; Kencana Prenadamedia Group.
- Feisal Tamin. 2004. *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Belantika.
- Fuad Fachruddin. 2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama*; Pustaka Alvabet.
- Ifdhal Kasim. 2001. *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan (Cetakan Pertama)*. Jakarta; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konsitusionalisme Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta; Konstitusi Perss.
2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta; Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Joan Nelson & Huntington. 2001. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Kadaruddin. 2021. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang; Formaci.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. 2018. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta.
- M. Guntur Hamzah. 2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta; Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



39. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta; Guna Media.
40. *Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua*. Jakarta: Pradyna
41. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta; Megatama.

Teuku Saiful Bahri Johan. 2021. *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstitusi*. Yogyakarta; Budi Utama.

Utami Pratiwi. 2014. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta; Saufa.

Wahyudi Komorotomo. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal:

Fajrudin. 2017. *Arti Penting Konstitusi Dalam Sebuah Negara*. Jurnal Hukum Dan Politik VIII. Nomor 1.

Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto. 2019. *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Isrimewa Yogyakarta*. Jurnal HAM 10.Nomor 2.

Inong. 2015. *Hak Konstitusional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pencalonan Sebagai Kepala Daerah*. Journal Katalogis. Volume 3. Nomor 1.

Irvan Ansyari. 2022. *Hak Politik dan Hukum Aparatur Sipil Negara Perspektif Mashlahah Mursalah*. Jurnal Ijtihad. Volume 38 Nomor 1.

La Ode Dedi Abdullah. 2018. *Sanksi Pidana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Hukum. Vol. 2. Nomor 2.

Muchlis Adi Putra Wajong. 2019. *Tugas Dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Lex Administratum. Vol VII. Nomor 2.

Napitupulu, Halen NM dan Sagala. 2019. *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus:Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018)*. Jurnal Ilmu Pendidikan PKN dan sosial Budaya. Vol.3. Nomor 1.

Nurul Qamar. 2011. *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 13. Nomor 2.



o J. 2003. *Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Jurnal . Vol.7.

d Saifulloh. 2022. *Rekontruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945*. Jurnal Volume 11. Nomor 2.

Roni Sulistyanto Luhukay. 2024. *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia.

Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas. 2021. *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Binamulia Hukum. Volume 10. Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Undang-Undang tentang tanggung jawab ASN Australia (*Public Service Act* 1999).

Undang-Undang tentang sistem pemilihan umum Australia (*Commonwealth Electoral Act* 1918).

Undang-Undang tentang pengelolaan, rekrutmen, dan pengangkatan pegawai di layanan publik Kanada (*Public Service Employment Act* 2003).

Undang-Undang tentang pemilihan umum federal Kanada (*Canada Elections Act*).

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Dzulfikar Alwi. 2019. *Hak Konstitusional Warga Negara Pada Pemilihan Umum*. Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Hasanuddin.

Moh. Iqbal Irvani Pratama. 2021. *Analisis Pelaksanaan Hak Memilih Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Makassar*, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin.

Kamus:



Indonesia (KBBI)

Artikel Internet:

Detiksulsel. 2024. *Bawaslu Sulsel Tangani Pelanggaran Netralitas ASN Terbanyak di Pinrang*. sumber: <https://www.detik.com/sulsel/pilkada/d-7524113/bawaslu-sulsel-tangani-98-pelanggaran-netralitas-asn-terbanyak-di-pinrang>.

Kompas nasional. 2019. *Netralitas PNS Melihat Kembali Saat Orde Baru*. Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/01/18231181/soal-netralitas-pns-melihat-kembali-saat-orde-baru-mempolitisasi-korpri>

Liputan6. 2024. *Fungsi ASN: Peran Vital Aparatur Sipil Negara Dalam Pemerintahan Indonesia*. Sumber: <https://www.liputan6.com/feeds/read/5827558/fungsi-asn-peran-vital-aparatur-sipil-negara-dalam-pemerintahan-indonesia>.

Tribunmakassar. 2024. *Terbukti Langgar Netralitas, Tiga Oknum ASN Pemprov Sulsel Terancam Sanksi*. Sumber: <https://makassar.tribunnews.com/2024/10/06/terbukti-langgar-netralitas-tiga-oknum-asn-pemprov-sulsel-terancam-sanksi>.

